

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dasar pemikiran dari teori keagenan merupakan suatu teori yang nantinya dapat membantu dalam memahami *coporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *agent* (manajer) dengan *principal* (investor). Pemilik mengharapkan return yang tinggi dari investasi yang ditanamkan sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi, hal tersebut menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik (Nugraheni dkk, 2015).

Pemilik termotivasi untuk mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dan meningkatkan laba, sedangkan manajer termotivasi untuk memenuhi kepentingan psikologinya (Herlambang dan Darsono, 2015). Kendala yang akan muncul antara *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang didapat antara manajer dan pemilik perusahaan (Bonita dan Raharja, 2014).

Manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya lebih mengetahui kondisi perusahaan daripada pemilik. Manajer berkewajiban memberikan laporan keuangan kepada pemilik (pemegang saham), sedangkan pemilik mengharapkan return yang tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidakseimbangan penguasaan 10 informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi.

Menurut Kusumaningtyas (2012) asimetri informasi dapat menyebabkan dua hal, yaitu:(a) *Moral Hazard*, yaitu bagaimana manajer tidak melaksanakan poin-point yang telah disepakati pada kontrak kerja, (b) *Adverse Selection*, merupakan kondisi dimana pemilik tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan yang benar-benar didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau adanya kelalaian dalam tugas. Praktik manajemen laba dapat terjadi akibat adanya asimetri informasi yang terjadi di dalam perusahaan.

Dalam teori agensi juga akan memicu terjadinya konflik yang dapat memicu biaya agensi (Indriastuti, 2012). Jensen and Meckling (1976) mengidentifikasi biaya keagenan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) *the monitoring expenditure by principal* adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik, (2) *the bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh principal kepada agent akibat monitoring yang dilakukan, (3) *the residual cost* adalah pengorbanan karena berkurangnya kemakmuran principal akibat dari terjadinya perbedaan keputusan antara *principal dan agent*.

2. *Corporate Governance*

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004) terdapat 5 prinsip dalam *good corporate governance*. Lima prinsip utama tersebut yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran. Sedangkan mekanisme *corporate governance* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *internal mechanism* dan *external mechanism*. *Good corporate governance* merupakan pengendalian kepada manajer agar tidak bertindak hanya menguntungkan dirinya

sendiri, namun juga harus menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer (Kusumaningtyas, 2013).

Good corporate governance menjadi isu hangat di negara maju terutama di Amerika dan negara Eropa, dengan terjadinya kasus kebangkrutan Enron Corporation di tahun 2001 (Kusumaningtyas, 2013). Skandal akuntansi Enron tersebut menyebabkan pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan regulasi SOX (*Sarbanes Oxley Act*). SOX dipublikasikan pada 30 Juli 2002, kegunaan dari SOX adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), mengembalikan kepercayaan para investor terhadap pasar modal, dan meningkatkan pengawasan terhadap kantor akuntan public (Sulistiawan dkk, 2011).

Corporate Governance timbul karena terjadinya kepemilikan dan pengendalian di dalam perusahaan. Pemisahan dan kepemilikan ini menimbulkan masalah keagenan yaitu menimbulkan asimetri informasi. Dalam masalah keagenan ini diperlukan adanya *good corporate governance* untuk menghilangkan masalah tersebut.

Selain itu, *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan, yaitu melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder (SY dan Hidayati, 2012).

Disisi lain Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa konsep dari *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelola perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

a. Prinsip *Good Corporate Governance* Perusahaan Perbankan

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2004 terdapat 5 prinsip *good corporate governance*, yaitu:

1) Keterbukaan (*transparency*)

Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank juga harus meyakini bahwa semua organ organisasi

mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan memahami peran dalam pelaksanaan GCG. Selain itu bank juga harus memastikan terdapatnya *check and balanced system* dalam pengelolaan bank.

3) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Selain itu bank juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4) Independensi (*independency*)

Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan bank tidak terpengaruh oleh pihak luar serta bebas dari benturan kepentingan. Bank juga harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5) Kewajaran (*fairness*)

Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

3. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. *Earning Management* atau manajemen laba merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba dilakukan dengan cara manajer memilih kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan (Agustia, 2013).

Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi (Sulistiawan dkk, 2011). Kebebasan manajer dalam menentukan standar akuntansi dan ketidaktahuan pemilik terhadap informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan itulah yang mendorong perilaku *oportunis manajer*, salah satunya adalah dengan melakukan manajemen laba.

Manajemen laba dapat dikatakan merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh manajer, karena manajer memanfaatkan ketidaktahuan orang lain akan informasi mengenai perusahaan yang sesungguhnya. Manajemen laba merupakan hal yang sulit untuk dihindari, karena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual digunakan karena dianggap lebih rasional dibandingkan dengan dasar kas (Bonita dan Raharja, 2014).

a. Akrual Diskresioner (*Discretionary Accruals*)

Manajemen laba dapat dilakukan dengan dasar akrual. *Jones Model* mengasumsikan bahwa akrual *nondiskresioner* bersifat tetap dari satu periode ke

periode lainnya, sehingga perubahan akrual yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan akrual diskresioner (Sulistiawan dkk, 2011).

Discretionary accrual merupakan pengakuan akrual laba atau beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen (Kusumaningtyas, 2013). Contoh dari *discretionary accrual* adalah pertimbangan tentang penentuan umur ekonomi aset tetap atau pertimbangan mengenai pemilihan metode depresiasi (Burhanudin dan Hanifah, 2016).

4. Komite Audit

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan komite audit, pengertian dari komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keberadaan komite audit di dalam organisasi perusahaan merupakan salah satu persyaratan implementasi *good corporate governance* bagi perusahaan publik (Prabowo, 2014). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya yang terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman maupun kualitas lain yang diperlukan (KNKCG, 2004).

Tugas dari komite audit adalah untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, untuk menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Kusumaningtyas, 2013). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Pasal 17,

salah satu syarat dari anggota komite audit adalah komite audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota komite audit juga harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen, hal tersebut perlu dimiliki oleh anggota komite audit untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam penyusunan laporan keuangan (Machmuddah, 2015).

a. Independensi Komite Audit

Salah satu prinsip dari komite audit adalah independensi komite audit. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain (Mulyadi, 2009). Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan keuangan. Individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani permasalahan yang terjadi (Prabowo, 2014). Dengan adanya anggota independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

b. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit didefinisikan sebagai keberadaan komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen

terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004).

Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Prabowo,2014). Adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham (Pastiti dan Meiranto, 2013).

c. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit merupakan salah satu syarat dari keanggotaan komite audit, bahwa komite audit harus memiliki paling sedikit 1 anggota komite audit yang memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan (Komite Nasional *Good Coporate Governance*, 2002). Dengan adanya komite audit yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan, maka laporan keuangan yang dibuat lebih berkualitas.

d. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Penyelenggaraan rapat komite audit diatur dalam Salinan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 BAB IV dengan aturan sebagai berikut:

1. Pasal 13: komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
2. Pasal 14: rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari satu perdua jumlah anggota.

3. Pasal 15: keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Pasal 16: setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Anggota-anggota komite audit harus menghadiri rapat tersebut termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan audit eksternal (KNKCG, 2002). Dengan banyaknya jumlah pertemuan yang diadakan dapat meningkatkan kegiatan komite audit dalam mengawasi manajemen, agar tidak hanya mengoptimalkan kepentingannya sendiri (Kusumaningtyas, 2013).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kusumaningtyas (2012) meneliti mengenai pengaruh independensi komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Independensi komite audit merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Kinerja dari komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki independensi dalam sikap dan pendapat. Disisi lain variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*.

Disisi lain Bonita dan Raharja (2014) meneliti mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Pada penelitian ini *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengaruh kualitas audit, dan pengaruh frekuensi pertemuan komite audit. Penelitian ini memberikan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Prabowo (2014) meneliti mengenai pengaruh komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah komite audit terhadap manajemen laba yang meneliti perusahaan manufaktur pada bursa efek Indonesia periode 2010-2012. Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara simultan variabel komisaris independen, independensi komite audit, ukuran, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Disisi lain variabel komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Kusumaningtyas (2013), penelitian tersebut meneliti mengenai pengaruh kompetensi dan aktivitas komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa keahlian komite audit dan jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Nabila dan Daljono (2013) meneliti mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan reputasi auditor terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel aktivitas komite audit, ukuran komite audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Disisi lain Rahmawati (2013) meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan Prastiti dan Meiranto (2013) yang meneliti mengenai Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lain, yaitu variabel keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Disisi lain Mishra (2016) meneliti mengenai karakteristik komite audit dan manajemen laba: studi kasus di India. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit, rangkap jabatan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independensi komite audit, keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Amar (2014) meneliti mengenai pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel independensi komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel kontrol ukuran auditor berpengaruh signifikan positif.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel yang digunakan		Hasil Penelitian
		Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	
1.	Metta Kusumangtyas (2012)	Manajemen laba	Independensi Komite Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional.	Independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Disisi lain kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2.	Annastasya Maria Bonita dan H. Raharja (2014)	Manajemen Laba	<i>Corporate Governance</i>	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Lanjutan Tabel 2.1

3.	Dwi Metta Karuniasih (2013)	Manajemen Laba	<i>Corporate Governance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Disisi lain proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan keberadaan top share tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
4.	Afifa Nabila dan Daljono (2013)	Manajemen Laba	Proporsi Dewan Komisaris, Independen, Komite Audit, Reputasi Auditor.	Variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel aktivitas komite audit, ukuran komite audit, reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Danuharja Arvin Prabowo (2014)	Manajemen Laba	Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Jumlah Pertemuan Komite audit.	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial ukuran dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Sedangkan komisaris independen dan independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI.
6.	Hikmah Is'ada Rahmawati (2013)	Manajemen Laba	<i>Good Coporate Governance</i>	Pada penelitian ini variabel dewan komisaris independen, komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun komite audit independen tidak berpengaruh negatif signifikan. Pada variabel kepemilikan manajerial juga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Lanjutan Tabel 2.1

7.	Omar Jumhani (2017)	Manajemen Laba	Komite Audit	Independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel ukuran komite audit, keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
8.	Anindyah Prastiti dan Meiranto (2013)	Manajemen Laba	Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit.	Variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel lain, yaitu variabel keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
9.	Mamta Mishra (2016)	Manajemen Laba	Karakteristik Komite Audit	Ukuran komite audit, rangkap jabatan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel independensi komite audit, keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
10.	Anis Ben Amar (2014)	Manajemen Laba	Independensi Komite Audit.	Variabel independensi komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan variabel kontrol ukuran auditor berpengaruh signifikan positif.

C. Kerangka Pemikiran

Praktik manajemen laba tidak dapat dipisahkan dari teori keagenan dan terjadinya asimetri informasi. Dalam teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki motivasinya masing-masing sehingga dapat memungkinkan timbulnya konflik kepentingan antara *agent dan principal* (Nabila dan Daljono, 2013). Masalah keagenan dapat dikurangi dengan mekanisme *corporate governance* (Amin, 2016). Salah satu konsep dari *good corporate governance* adalah dengan membentuk komite audit.

Penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) memberikan hasil bahwa komite audit yang memiliki independensi dalam menyatakan pendapat dan sikap akan membuat kinerja lebih efektif, karena dengan adanya pengawasan yang lebih efektif maka akan membuat praktik manajemen laba menurun. Selain sikap independen, komite audit juga memerlukan ukuran komite audit yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Penelitian yang dilakukan Kusumaningtyas (2014) memberikan hasil bahwa dengan ukuran komite audit yang semakin besar akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen. Ukuran komite audit yang besar akan memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manjerial, sehingga memberikan pengawasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemilik merasa bahwa kualitas pelaporan keuangan oleh manajemen terjamin.

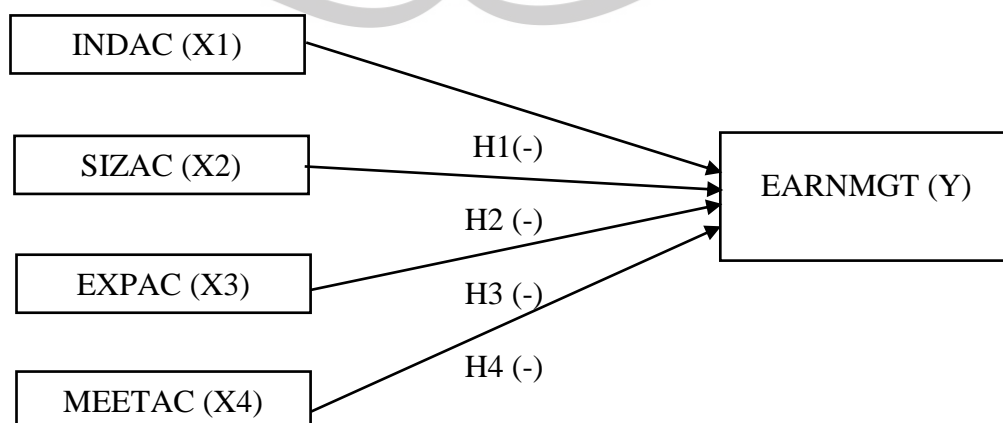
Penelitian yang dilakukan oleh Soliman dan Ragab (2014) memberikan hasil bahwa komite audit yang memiliki satu anggota yang ahli dalam bidang keuangan dapat menurunkan manipulasi laba pada laporan keuangan. Tidak

hanya sikap independen dan keahlian saja yang dimiliki oleh anggota komite audit, namun anggota komite audit juga memerlukan pertemuan atau rapat. Karena pertemuan yang dilakukan oleh komite audit merupakan hal yang penting dalam melakukan monitoring manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2013) menunjukkan hasil bahwa aktivitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan hal yang penting, karena dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka semakin terpantau kegiatan yang ada pada perusahaan. Hal tersebut akan membatasi praktik manajemen laba, karena terdapat pengawasan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian yang telah dijelaskan diatas maka variabel independen dalam penelitian ini adalah Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Keahlian Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit. Sedangkan variabel dependennya adalah Manajemen Laba. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

INDAC = *Independence Audit Committee*/Independensi Komite Audit

SIZAC = *Size Audit Committee*/Ukuran Komite Audit

EXPAC = *Expertise Audit Committee*/Keahlian Komite Audit

MEETAC = *Meeting Audit Committee*/Frekuensi Pertemuan Komite Audit

EARNMGT = *Earning Management*/Manajemen Laba

D. Hipotesis

1. Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris yang tugasnya untuk memonitor laporan keuangan dan kebijakan yang dilakukan manajemen terhadap perusahaan. Oleh karena itu diperlukan komite audit yang independen, supaya komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2012), Prastiti dan Meiranto (2013) memperoleh hasil bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari teori keagenan yang berpendapat bahwa komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dengan adanya anggota yang independen dalam bersikap dan berpendapat, maka akan membuat kinerja menjadi efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut :

H1: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Karakteristik komite audit yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen agar tidak merugikan pemilik perusahaan adalah ukuran komite audit. Dengan ukuran komite audit yang semakin besar akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen. Dengan demikian, pemilik merasa bahwa kualitas pelaporan keuangan oleh manajemen terjamin (Kusumaningtyas, 2014).

Jumhani (2017) dan Kusumaningtyas (2014) meneliti mengenai ukuran komite audit dan memberikan hasil ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin, sehingga dapat membatasi terjadinya manajemen laba. Sehingga besar ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Keahlian Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba terhadap laporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan tentunya akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang hanya menguntungkan manajemen.

Jumhani (2017) dan Kusumaningtyas (2013) meneliti mengenai keahlian komite audit dan memberikan hasil bahwa keahlian komite audit berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dengan semakin besar proporsi anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi maupun keuangan maka pelaporan keuangan yang dibuat akan lebih berkualitas. Hal tersebut disebabkan dengan adanya anggota yang ahli bidang akuntansi maka akan memudahkan dalam mendeteksi adanya manipulasi laba.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Menurut teori agensi, dengan banyaknya pertemuan audit yang diadakan dapat mengurangi masalah yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer (Bonita dan Raharja, 2014). Hal itu disebabkan karena komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja para manajer, sehingga dapat mengurangi masalah dalam pelaporan keuangan. Sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian Kusumaningtyas (2013) dan Soliman (2016) memberikan hasil bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komite audit yang dilakukan dalam bentuk pertemuan merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk melaksanakan *good corporate governance*, dengan semakin sering pelaksanaan rapat maka akan semakin terpantau kegiatan suatu perusahaan (Kusumaningtyas, 2013). Dari penjelasan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

